



BULETIN



KEMENKUM KALSEL NEWS

MINGGU KE-

4

SEPTEMBER 2025



SERAHKAN SERTIFIKAT HAK CIPTA MOTIF SASIRANGAN



DORONG KOPERASI LINDUNGI PRODUK LOKAL



RAPAT KOORDINASI LAYANAN UMUM

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM



Bermain Solid, Tim Kanwil Kemenkum Kalsel Capai Semifinal Turnamen Mini Soccer HUT INI & IPPAT



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam ajang Turnamen Mini Soccer yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke-117 dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke-38. Kegiatan berlangsung meriah di Lapangan Upik Miniso, pada Minggu (22/09), dengan diikuti berbagai tim dari instansi dan organisasi profesi.

Kanwil Kemenkum Kalsel menurunkan satu tim yang tampil penuh semangat dan mampu melaju hingga babak semifinal tanpa kebobolan. Meski perjuangan terhenti di fase tersebut, tim Kanwil tetap membanggakan dengan menampilkan permainan solid dan akan kembali berlaga pada perebutan juara 3.

Turnamen ini diikuti sejumlah peserta, di antaranya tim dari Pengwil 1 INI, Kantor Notaris Ina, Kantor Notaris Sabrina, Kantor Notaris Farid, Kantor Notaris Mordan, Kantor Notaris Yayat, ATR/BPN, serta tim Mahasiswa Magister Kenotariatan (M.Kn).

Kehadiran tim Kanwil Kemenkum Kalsel turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang memberikan dukungan langsung di lapangan.

Kegiatan ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, menjalin sinergi, serta memperkuat kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Kalsel, organisasi profesi, dan instansi terkait.



Kanwil Kemenkum Kalsel Lantik PPNS dan Notaris Pengganti: Menjaga Integritas dan Layanan Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Notaris Pengganti pada Senin, (22/9/25) di Balai Pertemuan Garuda.

Sebanyak delapan pejabat resmi dilantik, terdiri dari empat PPNS dari Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, yakni M. Dian Ansyari, S.H., M.H., Saipullah, S.H., Muhammad Hafidz, S.AP., dan Muhammad Yani, S.Sos. Sementara itu, empat Notaris Pengganti yang dilantik meliputi Wayni Mandarwati, S.H. (Kabupaten Barito Kuala), Alfian Noor, S.H. (Kota Banjarbaru), Muhammad Julian Shafarin, S.H. (Kota Banjarbaru), dan Faujiah, S.H. (Kota Banjarmasin).

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah jabatan, kata-kata pelantikan oleh Kepala Kantor Wilayah, serta penandatanganan berita acara oleh pejabat yang baru dilantik.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa PPNS memiliki peranan strategis dalam mendukung penegakan hukum pada bidang tertentu, meskipun tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Korwas PPNS Kepolisian.

“Tugas harus dilaksanakan secara profesional. Kementerian Hukum akan terus mendukung dengan fasilitasi dan penguatan kapasitas melalui kegiatan koordinasi di wilayah Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Kepada Notaris Pengganti, Kakanwil menekankan pentingnya menjaga profesionalisme karena kedudukan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris definitif.

“Notaris Pengganti dituntut untuk bekerja penuh ketelitian agar kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, rohaniawan, serta tamu undangan lainnya.



Sinergi Lintas Instansi, Kemenkum Kalsel dan Diskominfo HSS Perkuat Edukasi Publik



Kandangan, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi antarinstansi melalui program Edukasi dan Publikasi Lintas Instansi (EPLin). Kali ini, Kanwil Kemenkum Kalsel melaksanakan koordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada Senin (22/09).

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel diwakili oleh Pranata Humas Muda, Eko Sulistiyono, dan Ahli Pertama – Pranata Komputer, Muhammad Mahdian Noor. Rombongan diterima langsung oleh Plt. Kepala Diskominfo HSS, Tatik Sri R., bersama jajaran.

Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang publikasi, pemanfaatan media sosial dan media pers, serta pengembangan literasi informasi publik di daerah. Program EPLin sendiri merupakan upaya strategis Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memperluas jangkauan informasi hukum dan layanan Kementerian Hukum ke daerah melalui sinergi lintas instansi, terutama pada program dan kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak, yakni Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten HSS.

Plt. Kepala Diskominfo HSS, Tatik Sri R., menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan dukungannya agar kerja sama dapat terus berjalan. Menurutnya, kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Diskominfo HSS akan memperkuat arus informasi yang transparan, edukatif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Dengan terjalannya koordinasi ini, diharapkan implementasi EPLin dapat berjalan optimal, sehingga publikasi kegiatan dan layanan hukum semakin dekat, mudah diakses, dan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Webinar OKE KI #31 Bahas Peraturan Pelaksana Komisi Banding Paten



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Webinar Obrolan Kreatif Edukatif (OKE) KI seri #31 dengan tema “Peraturan Pelaksana Komisi Banding Paten”, Senin (22/09).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan diikuti oleh ASN serta pegawai pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.

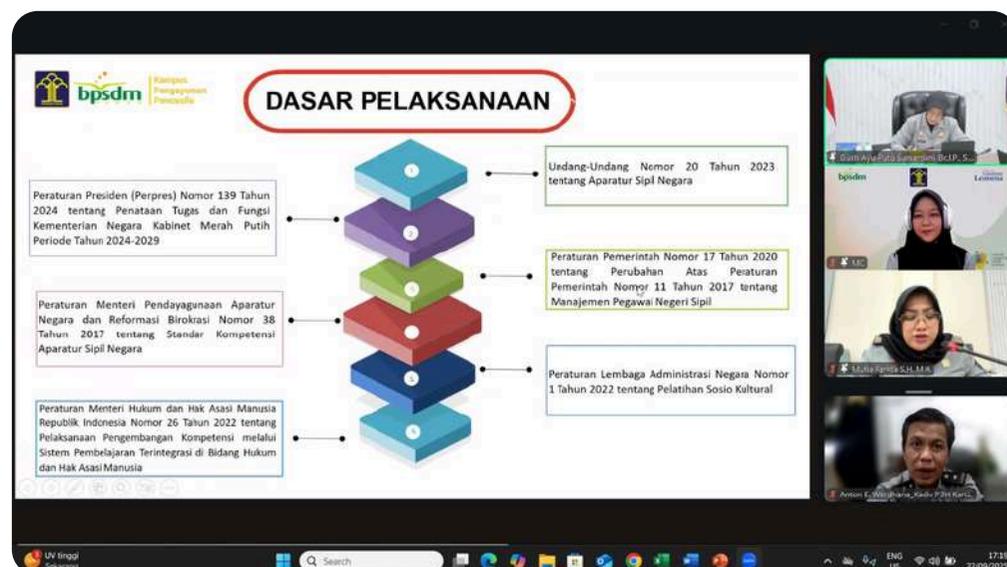
Hadir sebagai narasumber, Ibu Marolita Setiati Anwar, Direktur PT. Spruson Ferguson Indonesia, dan Ibu Lily Evelina Sitorus, Kepala Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Paten.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan secara komprehensif mengenai aturan teknis serta prosedur yang berlaku dalam proses banding paten di Indonesia. Selain itu, dijabarkan pula mengenai tata cara pengajuan permohonan banding, standar operasional prosedur (SOP), serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses banding di Komisi Banding Paten.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman ASN terhadap regulasi serta mekanisme banding paten semakin meningkat sehingga dapat mendukung pelayanan kekayaan intelektual di daerah.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Pembukaan Pelatihan Sosial Kultural Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) Angkatan II

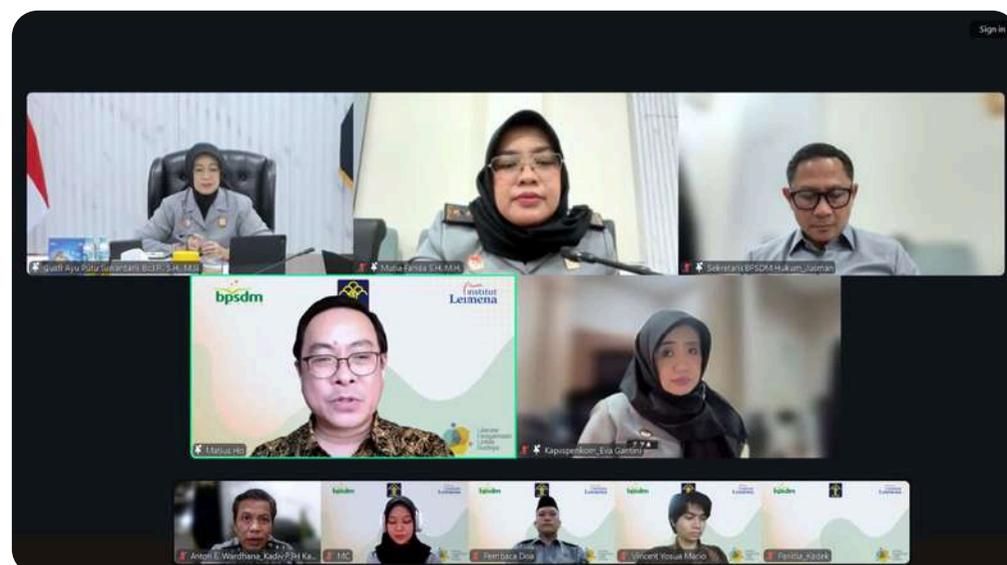


Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Sosial Kultural Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) Angkatan II Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum pada Senin (22/9/25).

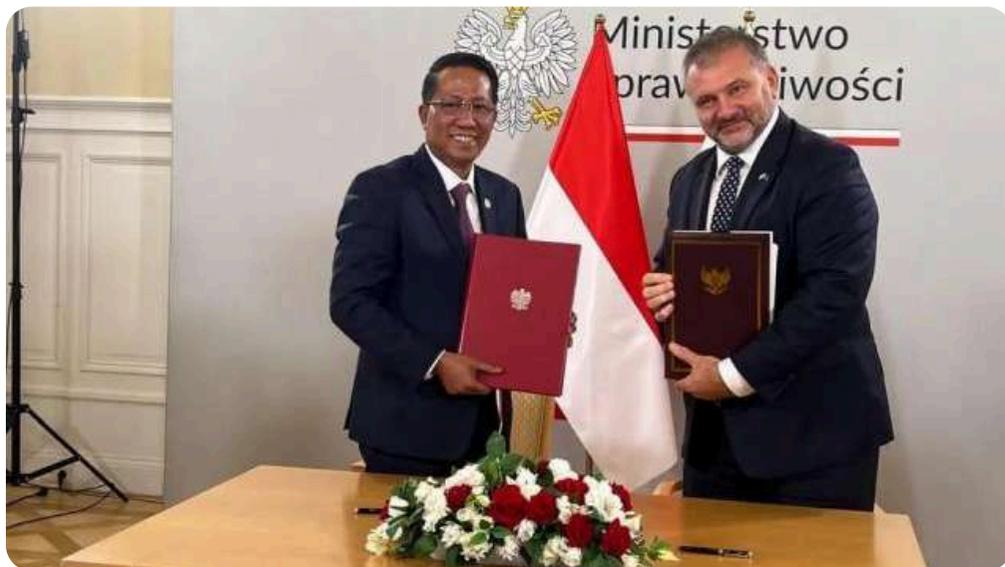
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam membangun literasi keagamaan lintas budaya, sehingga dapat memperkuat moderasi beragama di lingkungan kerja maupun masyarakat.

Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, hadir Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Analis Hukum Ahli Muda, Yulli Rachmadani, Penyuluh Hukum Ahli Muda, Dianor, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Eka Shanty Maulina serta pelaksana lainnya.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menginternalisasi nilai toleransi, keberagaman, dan kebersamaan dalam memberikan pelayanan publik yang berkeadilan dan berintegritas.



Kemenkum RI dan Polandia Tandatangani Perjanjian MLA dalam Masalah Pidana



Jakarta, Kemenkum RI – Pemerintah Indonesia dan Polandia resmi menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) pada Jumat (19/9/2025), di Kementerian Kehakiman Polandia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dan Menteri Kehakiman Polandia, Waldemar Zurek.

Perjanjian MLA tersebut menjadi kesepakatan kedua Indonesia dengan negara Eropa setelah Swiss. Menteri Hukum Supratman menegaskan, kerja sama ini merupakan langkah konkret pemberantasan kejahatan lintas negara, termasuk kejahatan umum, perpajakan, dan bea cukai. Selain itu, perjanjian ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF).

“Kerja sama ini tidak hanya mencakup pemberantasan kejahatan umum, tetapi juga kejahatan di bidang perpajakan dan bea cukai,” ujar Supratman melalui keterangan resmi. Ia menambahkan, penandatanganan ini bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Polandia sejak 19 September 1955, sehingga memiliki nilai historis yang sakral.

Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Zurek menyambut baik kerja sama tersebut dan menyebutnya sebagai awal baru hubungan hukum kedua negara. Polandia juga membuka peluang diskusi lebih lanjut terkait kemungkinan transfer tahanan dan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Selain MLA, kedua menteri juga menandatangani joint statement yang menegaskan komitmen memperkuat pertukaran pengalaman serta koordinasi antarkementerian. Supratman optimistis, kesepakatan ini dapat menjadi pintu masuk untuk menjalin perjanjian MLA dengan negara-negara Uni Eropa maupun mitra internasional lainnya.

Dalam penandatanganan tersebut, Menteri Hukum didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Inspektur Jenderal Nico Afinta, Staf Khusus Menkum Bidang Luar Negeri Yadi Hendriana, Staf Khusus Adam Muhammad, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri RI. Delegasi RI juga didampingi Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Polandia, Agus Heryana.

Menanggapi penandatanganan MLA tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyatakan bahwa kesepakatan ini akan memperkuat dukungan Indonesia dalam menghadapi tindak pidana lintas batas. “Perjanjian ini menjadi bukti keseriusan Indonesia memperluas kerja sama hukum internasional. Bagi kami di daerah, kesepakatan ini memberi kepastian hukum yang lebih kuat dalam upaya mendukung penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana lintas negara yang juga dapat berimplikasi ke daerah,” ungkapnya.

Kanwil Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Aturan Disiplin ASN Kabupaten Tapin

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Tapin tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Selasa, 23 September 2025, bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat ini dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel beserta jajaran. Agenda pembahasan berfokus pada penyelarasan norma, standar, serta substansi yang termuat dalam Ranperbup dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Tapin turut hadir dalam rapat, di antaranya Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin M. Luthfi, Kepala Bidang Pengembangan Karir dan KHP BKPSDM Kabupaten Tapin Baihaki, serta jajaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Kehadiran unsur Inspektorat, BKPSDM, dan Bagian Hukum menjadi penting untuk menyamakan persepsi terkait implementasi aturan disiplin yang menyentuh aspek pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin ASN di daerah.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa harmonisasi Ranperbup Tapin tentang Disiplin ASN merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan regulasi yang selaras dengan ketentuan nasional.

"Kami memastikan bahwa setiap produk hukum daerah, khususnya terkait pembinaan dan penegakan disiplin ASN, benar-benar terintegrasi dengan regulasi di atasnya sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan. Harmonisasi ini juga diharapkan dapat memperkuat profesionalisme aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapin," ujar Alex.

Melalui rapat ini, diharapkan Ranperbup Tapin tentang Disiplin ASN dapat memperkuat tata kelola kepegawaian yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi prinsip pemerintahan yang baik, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penerapan aturan disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.



Kemenkum Kalsel Terus Dorong Pembentukan Posbankum, Giliran Kabupaten HSS Capai 100% Pembentukan Posbankum

Kandangan, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan memperkuat komitmennya dalam memperluas akses bantuan hukum dengan meresmikan 100% Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang dirangkaikan dengan pembukaan Pelatihan Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan. Kegiatan berlangsung di Pendopo Kabupaten HSS pada Selasa (23/9).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, hadir didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.

Acara turut dihadiri Wakil Bupati HSS, Suriani, Sekretaris Daerah, Muhammad Noor, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Desa, Lurah, Camat se-Kabupaten HSS, serta perwakilan peserta pelatihan paralegal. Hadir pula Ketua Lembaga Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga sebagai pemateri dalam pelatihan Paralegal.

Kegiatan ini juga menghadirkan keynote speech dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen yang diwakili oleh Constantinus Kristomo selaku Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten HSS yang berhasil merampungkan pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Ia juga berharap, keberadaan Posbankum dapat menjadi sarana strategis untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan mendekatkan akses keadilan.

Sebagai tanda peresmian, dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) Posbankum oleh Wakil Bupati HSS kepada Kakanwil Kemenkum Kalsel. Selanjutnya, Kakanwil menyerahkan kembali Surat Tanda Register (STR) Posbankum kepada Wakil Bupati HSS untuk kemudian diteruskan ke seluruh desa dan kelurahan di wilayah tersebut. Prosesi ini menjadi simbol sinergi antara Pemerintah Kabupaten HSS dengan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mewujudkan akses bantuan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemkab HSS.

“Posbankum adalah wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, kita memastikan setiap desa dan kelurahan memiliki akses keadilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati HSS, Suriani, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keberadaan Posbankum.

“Kami berharap dengan adanya Posbankum dan paralegal di setiap desa dan kelurahan, masyarakat lebih mudah memperoleh pendampingan hukum serta mampu menyelesaikan konflik secara damai,” ucapnya.

Selain peresmian, kegiatan ini juga menandai dibukanya Pelatihan Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan. Para peserta akan dibekali kemampuan dasar hukum, keterampilan mediasi dan negosiasi, serta literasi hukum untuk mendukung keberadaan Posbankum sebagai sarana penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal.

Dengan langkah ini, sinergi antara Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten HSS semakin kokoh dalam membangun masyarakat sadar hukum serta memperluas akses keadilan di Kalimantan Selatan.



Penguatan SDM, Pimpinan Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Assessment TalentDNA



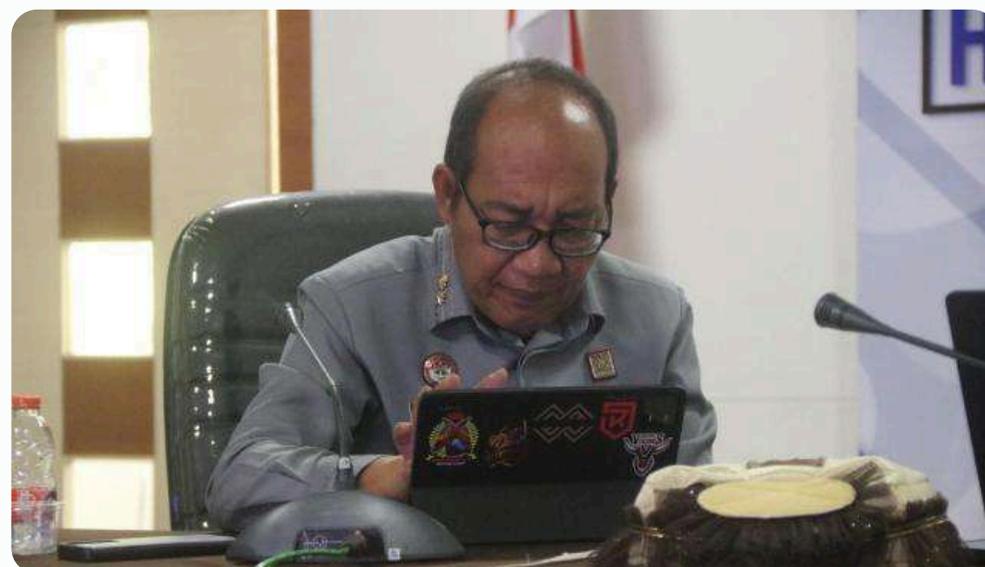
Kandangan, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Assessment TalentDNA bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Selasa (23/09).

Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Fajar Sulaiman Tamam, menegaskan pentingnya assessment ini sebagai sarana kalibrasi penilaian manajemen talenta di lingkungan Kementerian Hukum.

“Assessment TalentDNA berfungsi untuk memberikan perencanaan karir yang tepat dan pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan organisasi. Melalui assessment ini, kita memastikan potensi individu mendapatkan kesempatan pengembangan yang sesuai dan dapat menempati posisi strategis yang dibutuhkan organisasi,” ujar Fajar.

Assessment TalentDNA dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem manajemen SDM berbasis merit. Dengan demikian, hasilnya akan menjadi dasar objektif bagi Kementerian Hukum dalam melakukan pengembangan karir, rotasi, promosi, hingga penyusunan program pelatihan pimpinan di masa mendatang.

Partisipasi JPTP Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen daerah untuk mendukung kebijakan nasional di bidang penguatan ASN serta memastikan bahwa kepemimpinan di wilayah dikelola oleh figur yang berkompeten, visioner, dan sesuai kebutuhan organisasi.



Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Koperasi Lindungi Produk Lokal Lewat Merek Kolektif

HSS, Yankum_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menggelar Sosialisasi Perlindungan Merek Kolektif kepada Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa (23/9). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan serta Pembukaan Pelatihan Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan.

Acara yang berlangsung di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati H. Suriani. Ia menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan hukum dan memperkuat pemberdayaan koperasi di daerah.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang berhasil membentuk Posbankum dengan rasio 100% dengan jumlah 144 desa dan 4 kelurahan, sehingga seluruh masyarakat di tingkat desa dapat memperoleh layanan hukum secara gratis.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa perlindungan hukum terhadap produk lokal harus menjadi perhatian serius bagi koperasi.

“Merek kolektif adalah salah satu instrumen penting agar produk koperasi kita tidak hanya dikenal, tetapi juga memiliki kekuatan hukum. Dengan begitu, produk unggulan desa akan lebih kompetitif di pasar, terlindungi dari peniruan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual,” ujarnya.

Dalam sosialisasi ini, Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual juga memberikan materi terkait pengertian dan manfaat merek kolektif, persyaratan pendaftaran, serta strategi pemanfaatan merek kolektif dalam pengembangan usaha koperasi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap koperasi-koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat segera mendaftarkan merek kolektifnya, sehingga semakin memperkuat posisi produk lokal di tingkat regional maupun nasional.



Menkum Supratman Kenalkan Protokol Jakarta Sebagai Inisiatif Multi Sektor Royalti Musik dan Publisher di BRICS

Rio de Janeiro, Brasil - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang kekayaan intelektual (KI) saat menghadiri 17th Heads of BRICS Intellectual Property Offices Meeting yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil pada 21-23 September 2025. Ini merupakan kali pertama Indonesia hadir dalam pertemuan penting di bidang KI sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai inisiator kerja sama strategis. Salah satu langkah penting adalah memperkenalkan Protokol Jakarta, sebuah kerangka kerja kolaboratif yang digagas Indonesia untuk menjawab tantangan KI, khususnya hak cipta di era digital.

“Protokol Jakarta merupakan inisiatif multi-sektor yang fokus pada perlindungan dan pemanfaatan karya digital, khususnya di bidang musik, audiovisual, dan karya jurnalistik dalam ekosistem platform daring”, jelas Menteri Supratman. Inisiasi ini lahir dari kebutuhan mendesak negara berkembang untuk mendapatkan keadilan dalam ekosistem musik digital global.

Selama ini para pencipta dari negara berkembang sering tidak mendapatkan distribusi royalti yang seimbang, meskipun karya mereka digunakan secara luas.

“Protokol Jakarta adalah kontribusi nyata Indonesia untuk memastikan KI menjadi katalis bagi pembangunan ekonomi global yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Supratman.

Dalam pertemuan BRICS ini, Menteri Supratman juga menekankan bahwa KI merupakan pilar utama pembangunan nasional dan dapat memperkuat kemitraan global, selaras dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Indonesia tengah melakukan modernisasi regulasi KI melalui pemberlakuan Undang-Undang Paten terbaru serta menyelesaikan pembaruan Undang-Undang Hak Cipta dan Desain Industri agar selaras dengan standar global dan teknologi yang terus berkembang.

“Ekosistem KI di Indonesia terus diperkuat dengan mendorong pemanfaatan sertifikat KI sebagai jaminan pinjaman perbankan bagi para pengusaha UMKM. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga terus mengakselerasi transformasi digital layanan KI agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat serta dunia usaha,” kata Supratman di hadapan para delegasi negara peserta.

Menteri Supratman juga menyatakan bahwa Indonesia siap memperkuat kolaborasi dengan para negara anggota BRICS dalam pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas untuk mengurangi ketimpangan antar negara.

Kehadiran Indonesia di forum ini menandai babak baru diplomasi KI di tingkat global. Menteri Supratman menegaskan bahwa peran Indonesia dalam BRICS bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperjuangkan tatanan global yang inklusif dan berkeadilan melalui kekayaan intelektual. Menteri Hukum juga meminta dukungan untuk Protokol Jakarta yang akan dibawa lebih lanjut dalam forum Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR)WIPO di Jenewa, Desember 2025 mendatang.



Di Forum lain di Warsawa, beberapa hari sebelumnya, Menteri Hukum juga sempat bertemu Menteri Kehakiman, Waldemar Zurex dan Wakil Menteri Luar Negeri Polandia W.T. Bartowzewski serta menyampaikan Protokol Jakarta sebagai perlindungan hak cipta yang akan digagas Indonesia di WIPO, sebagai langkah maju untuk memberi perlindungan global terhadap mereka para pencipta seni dan karya jurnalistik.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, mendukung penuh atas langkah strategis Menteri Hukum RI yang memperkenalkan Protokol Jakarta dalam forum BRICS.

“Gagasan Protokol Jakarta menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam membangun keadilan global di bidang kekayaan intelektual. Ini menjadi momentum penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memastikan para pencipta karya memperoleh hak ekonomi yang layak, khususnya di ranah digital. Di tingkat daerah, kami siap mendukung implementasi kebijakan ini melalui peningkatan kesadaran, pelayanan KI yang mudah diakses, serta penguatan peran KI sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM,” ujar Alex Cosmas Pinem.



© Copyright | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Dorong Layanan Berkualitas, Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Selasa (23/09/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI.

Kegiatan dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Eko Herdianto, Koordinator Pokja Penataan SDM, mewakili Kepala Kantor Wilayah Alex Cosmas Pinem. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan wajah institusi Kementerian Hukum, di mana kualitas layanan akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Di era keterbukaan ini, masyarakat menuntut layanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar. Karena itu, pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, serta mencegah penyalahgunaan wewenang,” ujar Eko mewakili Kakanwil.

Ia juga menegaskan tiga poin penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik, yakni transformasi pola pikir dari dilayani menjadi melayani dengan fokus pada kepuasan masyarakat; inovasi dan digitalisasi untuk mempermudah akses layanan; serta integritas tinggi tanpa toleransi terhadap praktik gratifikasi atau pungli sekecil apa pun.

Sosialisasi ini menghadirkan pemaparan mengenai instrumen evaluasi pelayanan publik berbasis Indeks Pelayanan Publik (IPP), yang mencakup aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Kegiatan diikuti oleh Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Eko Herdianto, Koordinator Pokja Penataan SDM, serta jajaran pegawai Kanwil. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh ASN Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dapat berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Kanwil Kemenkum Kalsel dan Satpol PP Balangan Bahas Perubahan Perda Ketertiban Umum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Rabu (24/09/2025). Rapat yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama Kepala Satpol PP Balangan, Noor Aspariah, beserta jajaran terkait.

Ranperda yang dibahas dalam forum harmonisasi tersebut adalah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

Perubahan ini diajukan Pemerintah Kabupaten Balangan guna menyesuaikan regulasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan hukum agar lebih efektif dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dalam arahnya, Anton Edward Wardhana menegaskan pentingnya proses harmonisasi untuk memastikan rancangan peraturan perundang-undangan memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan peraturan di atasnya.

“Melalui harmonisasi ini kami memberikan masukan atas konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan agar substansi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat,” ujarnya.

Rapat harmonisasi ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan produk hukum yang berkualitas, jelas, dan berdaya guna, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan pelayanan publik di daerah.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Diseminasi Evaluasi Tata Kelola Administrasi PPNS KI



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Tim Kerja Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Diseminasi Evaluasi Tata Kelola Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual (KI) yang digelar secara daring pada Selasa (23/09).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI, dalam rangka meningkatkan tata kelola PPNS KI, menginventarisasi keberadaan PPNS KI yang masih aktif di unit penegakan hukum, sekaligus mendukung administrasi terkait mutasi, pengangkatan kembali, perpanjangan kartu tanda penyidik, hingga pemberhentian sementara dan penghapusan PPNS KI yang memasuki masa pensiun.

Pada kesempatan ini DJKI menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara unit pusat dan kantor wilayah, khususnya terkait akurasi data PPNS KI. Hal ini mencakup penertiban data ganda, penyesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP), serta pembaruan status administrasi bagi penyidik yang telah memasuki usia pensiun.

Tim Kerja Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel turut mencermati poin-poin strategis yang disampaikan, terutama mengenai peran aktif kantor wilayah dalam mendukung kelancaran sistem administrasi PPNS KI.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel memperkuat komitmen untuk terus mendukung tata kelola penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, sejalan dengan mandat Kementerian Hukum RI dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kepastian hukum di daerah.

| LAYANAN | UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| | PERATURAN PEMERINTAH 27 TAHUN 1981 | PERATURAN PEMERINTAH 58 TAHUN 2010 | PERATURAN PEMERINTAH 92 TAHUN 2015 | |
| | PERMENKUMHAM RI NOMOR M.04.PW.07.03 TAHUN 2007 | PERMENKUMHAM NOMOR M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 | PERMENKUMHAM NOMOR 5 TAHUN 2016 | PERMENKUMHAM NOMOR 26 TAHUN 2025 |
| VERIFIKASI ADMINISTRASI | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM |
| PENGANGKATAN PPNS | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM |
| PELANGKARAN PPNS | KJL/PEMDA | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM |
| MUTASI PPNS | KJL/PEMDA | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM |
| PEMBERHENTIAN PPNS | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM |
| PENGANGKATAN KEMBALI PPNS | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM |
| PENEBBITAN KTP PPNS | KJL | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM |



| DIM | Jumlah |
|---|--------|
| PPNS aktif belum melakukan pemutakhiran data (mutasi ke Kemenkum) | 134 |
| PPNS aktif belum pernah update /mutasi data/perpanjangan masa berlaku dari awal PPNS tsb dilantik (berdasarkan log transaksi) | 59 |
| PPNS belum aktif (verifikasi/pengangkatan) dan perlu ditindaklanjuti | 21 |
| Data NIP PPNS telah masuk klasifikasi usia pensiun dan perlu ditindaklanjuti (perpanjangan masa kerja PPNS / pemberhentian) | 18 |
| Data NIP lama atau kurang dari 18 digit perlu ditindaklanjuti | 9 |
| Data ganda perlu konfirmasi dan ditindaklanjuti | 15 |

Kanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Survey Bangunan Ex-Persidangan di Kotabaru

Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam rapat rutin bulanan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (24/09).

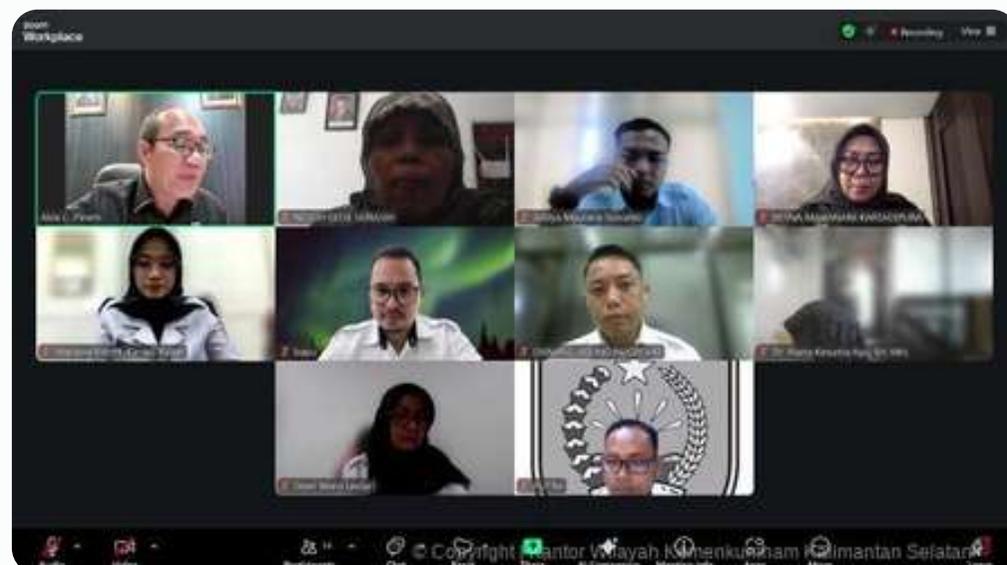
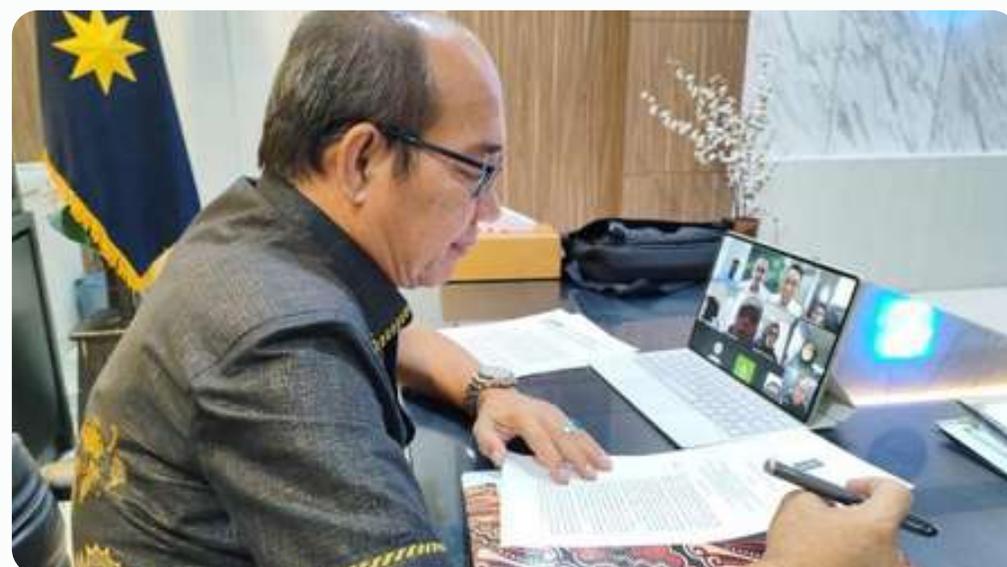
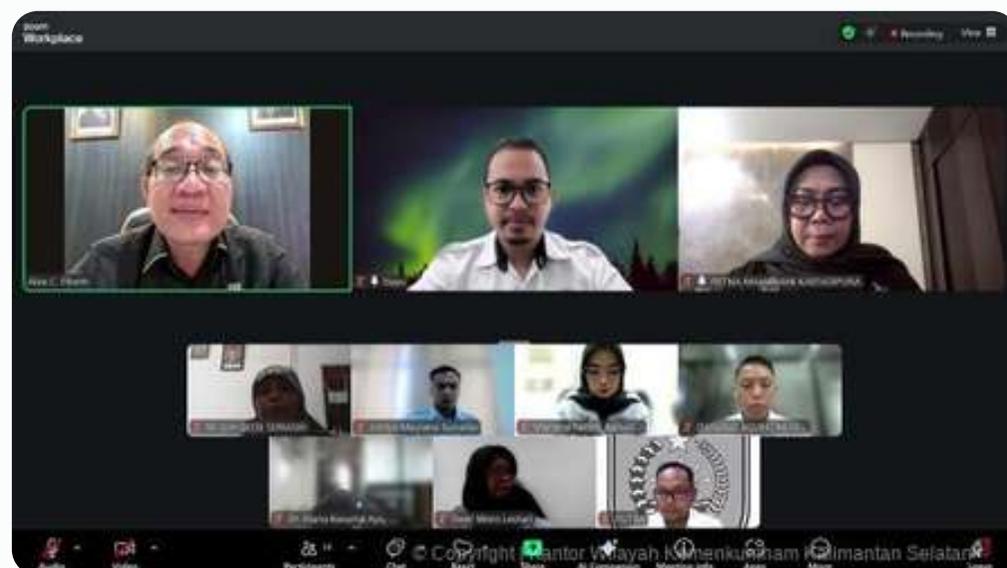
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas agenda rutin pengawasan terhadap notaris, sekaligus menanggapi berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik kenotariatan di wilayah Kalimantan Selatan. Seluruh anggota MPW Notaris Kalsel turut hadir dalam forum tersebut.

Dalam arahannya, Alex Cosmas Pinem menegaskan pentingnya peran MPW sebagai garda terdepan dalam memastikan notaris menjalankan tugas profesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan perlunya sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga integritas profesi notaris sebagai pejabat umum.

“Majelis Pengawas Wilayah harus terus mengedepankan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dengan begitu, kita dapat menjaga kepercayaan publik terhadap notaris, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Alex.

Lebih lanjut, ia mendorong agar setiap laporan atau permasalahan terkait notaris ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan solusi konstruktif bagi perbaikan layanan kenotariatan di daerah.

Dengan adanya rapat rutin ini, diharapkan MPW Notaris Kalsel semakin memperkuat fungsi pengawasannya, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Implementasi Permenkumham tentang Bantuan Hukum



Kotabaru, TUM_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bagian Tata Usaha & Umum melaksanakan survey kondisi Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan ex-persidangan yang berlokasi di Desa Seratak, Selasa (23/09).

Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Khairunnisa sebagai pelaksana pada Bidang Gedung dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kab. Kotabaru. Dalam pertemuan tersebut, pihak Khairunnisa menyampaikan hasil penilaian kerusakan pada bangunan ex-persidangan dengan tingkat kerusakan lebih dari 65 persen. Berdasarkan analisis, rehabilitasi dinilai tidak efisien sehingga langkah selanjutnya adalah pengusulan persetujuan penghapusan aset kepada Sekretaris Jenderal Kemenkum.

Usai koordinasi, tim melanjutkan survey lapangan untuk memastikan apakah masih terdapat material bangunan, seperti kayu, yang dapat dimanfaatkan untuk proses lelang setelah persetujuan penghapusan diterbitkan. Kepala Desa Seratak turut menyampaikan aspirasi agar tanah bekas bangunan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat, dan berkomitmen mengajukan permohonan resmi kepada Kanwil Kemenkum Kalsel.



Kepala Bagian Tata Usaha & Umum, Rustam Sakka, menyampaikan apresiasinya kepada Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru. "Kami mengapresiasi langkah Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru yang telah melakukan analisis kerusakan bangunan ex-persidangan milik Kanwil Kemenkum Kalsel. Dengan tingkat kerusakan yang signifikan, langkah penghapusan aset menjadi pilihan yang lebih tepat dan efisien. Kami juga membuka ruang sinergi dengan pemerintah desa agar tanah eks bangunan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, tentunya melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku," ujarnya.

Kegiatan survey berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan data dukung penting berupa Analisa Kerusakan Bangunan Gedung Negara dari Dinas PUPR Kotabaru.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalsel akan segera menyiapkan langkah administratif untuk mengusulkan persetujuan penghapusan aset kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, sekaligus memastikan pengelolaan aset negara tetap akuntabel dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kelompok Kerja Harmonisasi 1 menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, Kamis (25/9/2025) di Balai Pertemuan Garuda, Banjarmasin.

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, serta dihadiri jajaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Banjar dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar.



Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar, Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, menyampaikan pandangan serta urgensi terkait penyusunan Raperda dimaksud. Proses pengharmonisasian kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal oleh tim perancang. Beberapa ketentuan masih memerlukan pengkajian lebih mendalam agar selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Ketua Pokja Harmonisasi 1, Eryck Yulianto, menegaskan bahwa harmonisasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk memastikan kualitas produk hukum daerah.



“Kanwil Kemenkumham Kalsel berkomitmen memastikan setiap Ranperda yang dibahas, termasuk terkait penyertaan modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah, selaras dengan ketentuan hukum nasional dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Harmonisasi ini penting agar produk hukum daerah dapat memberi kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen hasil harmonisasi serta sesi foto bersama, menandai komitmen bersama dalam menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, selaras dengan hukum nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banjar. (Humas Kemenkum Kalsel, teks & foto: Devin, ed: Eko)

Kemenkum Kalsel Dukung HSS Innovation Award 2025, Serahkan Sertifikat Hak Cipta Kepada Pemerintah Daerah

HSS, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan memberikan dukungan penuh terhadap program inovasi daerah melalui kehadiran pada kegiatan Diseminasi Inovasi dan Penyerahan Sertifikat Hak Cipta – HSS Innovation Award 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Bappelitbangda, Rabu (24/09).

Acara yang berlangsung di Pendopo Bupati HSS ini dibuka secara resmi dengan rangkaian seremonial, dimulai dari menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, hingga sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan.



Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Riswandi, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah untuk menyerahkan secara simbolis Sertifikat Hak Cipta kepada perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten HSS. Penyerahan ini menjadi tanda pentingnya perlindungan hukum atas karya cipta dan inovasi daerah, sekaligus bentuk nyata sinergi antara Kemenkum dan Pemerintah Daerah.

Selain penyerahan sertifikat, kegiatan ini juga diisi dengan penghargaan kepada para inovator daerah yang berhasil masuk dalam kategori Top Inovasi. Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi para pelaku inovasi untuk terus berkarya, berkreasi, dan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.



Melalui kegiatan ini, Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya inovasi berbasis riset dan pengembangan, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Kemenkum Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, menyatakan siap mendukung penuh upaya daerah dalam memajukan inovasi dan melindungi karya masyarakat melalui layanan kekayaan intelektual yang cepat, transparan, dan akuntabel. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang KI, ed: Eko, Lutfi)

Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Efektivitas Layanan Fasilitatif Melalui Rapat Koordinasi Layanan Umum

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka mengikuti Rapat Koordinasi Layanan Umum yang diselenggarakan secara virtual oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Kamis (25/9).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal, Risman Somantri, dan diikuti oleh pejabat/pegawai Bagian Tata Usaha dan Umum dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta peningkatan tata kelola layanan umum di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui forum ini, diharapkan setiap Kanwil mampu menyamakan persepsi serta melaksanakan standar layanan umum yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Kabag TU dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan bahwa partisipasi dalam Rakor ini menjadi sarana strategis dalam memastikan layanan administrasi dan tata usaha dapat berjalan sesuai arahan pusat, serta mendukung optimalisasi kinerja organisasi di tingkat wilayah.

Dengan pelaksanaan Rapat ini, diharapkan pelayanan umum di jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel dapat semakin ditingkatkan sehingga mampu menunjang pencapaian program prioritas Kementerian Hukum secara menyeluruh. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel | teks dan foto: Joel/Mahdi | ed: Eko)



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Persiapan Serah Terima PPPK TA 2024, Dukung Optimalisasi Kinerja



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan persiapan serah terima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 yang digelar secara daring oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Kamis (25/9).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenkum, Fajar Sulaeman Taman, dan diikuti oleh seluruh unit pusat serta kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum. Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka beserta jajarannya.

Dalam kesempatan tersebut dipaparkan ketentuan penting mengenai PPPK paruh waktu, mulai dari mekanisme kerja, penggajian, hingga disiplin dan sanksi. Disampaikan pula komposisi pemangku jabatan PPPK Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari jabatan Penata, Pengelola, hingga Operator Layanan Operasional.

Kalimantan Selatan pada tahun anggaran ini mendapatkan formasi 1 orang PPPK, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kepala Biro SDM Kemenkum, Fajar Sulaeman Taman, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan serah terima ini menjadi bagian penting dari tata kelola sumber daya manusia aparatur.

“PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu hadir untuk memperkuat kinerja organisasi. Kami harap seluruh unit kerja dapat memaksimalkan keberadaan pegawai baru ini sesuai kebutuhan instansi,” tegas Fajar.

Sementara itu, Kepala Bagian TU & Umum Kanwil Kemenkum Kalsel, Rustam Sakka, menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini.

“Kami menyambut baik adanya formasi PPPK di Kalimantan Selatan, hal ini akan sangat berarti bagi peningkatan pelayanan. Kanwil Kemenkum Kalsel siap memberikan pembinaan agar pegawai yang diterima dapat segera beradaptasi dan bekerja optimal,” ujarnya.

Kegiatan persiapan serah terima ini menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan penyerahan PPPK secara resmi, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB terkait kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum.



Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti rapat Informasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, yang digelar secara daring pada Kamis (25/09/2025).

Rapat ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum sebagai tindak lanjut atas PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 jo. PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024, serta Keputusan Menpan RB Nomor 194 Tahun 2025 mengenai Instansi Pelaksana Evaluasi Zona Integritas secara mandiri. Kegiatan juga mengacu pada Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-2.OT.03.02 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Mandiri (TPM) ZI Kementerian Hukum.

Kanwil Kemenkum Kalsel hadir dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang juga selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkum Kalsel, didampingi masing-masing ketua Pokja WBK dan tim.

Berdasarkan surat edaran TPM, pelaksanaan penilaian akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu Desk Wawancara pada 29 September – 3 Oktober 2025 serta Verifikasi Lapangan pada 6–9 Oktober 2025. Kanwil Kemenkum Kalsel sendiri dijadwalkan mengikuti Desk Wawancara pada Kamis, 2 Oktober 2025 dan Verifikasi Lapangan pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Melalui keikutsertaan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmen dalam implementasi nyata bukan sekedar sebagai aspek penilaian WBK, mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Kalimantan 2025



Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton E. Wardhana, menghadiri kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Kalimantan 2025 yang dilaksanakan pada Kamis (25/9) di Gedung BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia ini mengusung tema “Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani Untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan”, sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Forkopimda Provinsi, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta perwakilan K/L terkait seperti Bulog, BUMD, Dinas Pertanian, dan Dinas PMD serta Kepala Kabtor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menyampaikan pentingnya sinergitas seluruh pihak dalam mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi pangan. Ia menekankan bahwa GNPIP merupakan program nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, serta mendukung daya beli dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, ia mencontohkan inovasi budidaya padi terapung di tiga kabupaten, yakni Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara, yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mempercepat masa panen. Jika sebelumnya panen padi membutuhkan waktu tujuh bulan, kini hanya tiga bulan dengan hasil produksi meningkat dari 3–4 ton menjadi 6–7 ton per hektar.

“Menariknya, hasil panen di Kabupaten Barito Kuala bahkan mencapai 7–8 ton per hektar berkat penggunaan bibit lokal, lebih tinggi dibanding hasil panen di Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara yang menggunakan bibit campuran,” ungkapnya.

Kegiatan GNPIP juga dirangkaikan dengan penandatanganan sejumlah komitmen strategis, di antaranya dukungan percepatan swasembada pangan melalui sarana dan prasarana, kerja sama antara Bank Indonesia dengan Gapoktan/Poktan, Bulog, BUMD, hingga penguatan kerja sama antar daerah di Kalimantan guna menjaga stabilitas pasokan pangan.

Sebagai penutup, dilakukan seremoni simbolis panen padi terapung yang menjadi bentuk implementasi inovasi pertanian di Kalimantan Selatan, serta sesi foto bersama seluruh peserta.

Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Penggunaan Merek Kolektif dalam Rapat Koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (26/9/2025) di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setda Provinsi Kalsel.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait percepatan konsolidasi Satuan Tugas KDKMP. Rapat dihadiri oleh perwakilan dinas koperasi, perindustrian, perdagangan, dan tenaga kerja dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Fokus utama rapat membahas langkah strategis, terpadu, dan terintegrasi guna mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tingkat provinsi, termasuk sinergi program antarinstansi pemerintah daerah, BUMN, maupun perbankan. Dukungan tersebut di antaranya mencakup penyediaan sarana produksi, akses permodalan, logistik, hingga pemasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel menekankan pentingnya pemanfaatan merek kolektif sebagai upaya meningkatkan daya saing koperasi. Merek kolektif diharapkan dapat menjaga kualitas dan standar mutu produk, sekaligus menjadi perlindungan hukum yang kuat bagi produk yang dihasilkan koperasi.

“Dengan merek kolektif, anggota koperasi bisa menggunakan satu identitas bersama yang terjamin secara hukum. Hal ini tidak hanya menjaga kualitas produk, tetapi juga mencegah persaingan tidak sehat di antara anggota, serta meningkatkan nilai ekonomi produk di pasar,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi.

Selain itu, rapat juga menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi program, termasuk peran aktif pemerintah kabupaten/kota serta PIC (Person in Charge) dari masing-masing perusahaan dalam implementasi di lapangan. Setiap kendala operasional diidentifikasi untuk dicari solusi secara kolaboratif, sehingga menghasilkan timeline dan tindak lanjut yang jelas.

Melalui rapat ini, diharapkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.



ASN Kemenkum Kalsel Ikuti Pelatihan Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya



Banjarmasin, Humas_Info – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui partisipasi pada Program Internasional Bersertifikat: Pelatihan Sosial Kultural Pengenalan Literasi Keagamaan Lintas Budaya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum bekerja sama dengan Institut Leimena, dan pada Kamis (25/9) memasuki hari keempat sekaligus penutupan.

Kanwil Kemenkum Kalsel mengikutsertakan lima orang ASN, yakni Yulli Rachmadani (Analisis Hukum Ahli Muda), Dianor (Penyuluh Hukum Ahli Muda), Eka Shanty Maulina (Analisis PK APBN Ahli Muda), Danang Agung Nugroho (Perancang Per UU Ahli Muda), serta Nur Ipansyah (Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi).



Sesi utama hari keempat membahas Kompetensi Kolaboratif yang dipandu oleh Mutia Farida, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Teknis Kepemimpinan BPSDM. Ia menekankan bahwa kerja sama antarindividu dengan keyakinan berbeda harus dibangun tanpa mengorbankan identitas dan iman masing-masing.

Selanjutnya, Julinar Sinaga, Program Manager Institut Leimena, menguraikan pengembangan program Cross Cultural Religious Literacy yang menekankan kompetensi bekerja lintas agama, keterampilan kolaborasi, pemahaman diri, serta kemampuan komparatif.

Sementara itu, Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Leimena, menjelaskan pentingnya Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLb) dalam konteks Indonesia yang majemuk. Menurutnya, pluralisme kovenantal dapat menjadi landasan dalam membangun kesepakatan sosial bersama di tengah keragaman. Ia juga berharap kegiatan positif seperti ini semakin sering dilaksanakan bersama Kementerian Hukum sebagai bentuk penguatan kebebasan beragama dan kerukunan sosial.

Kegiatan ditutup oleh Mutia Farida yang mewakili Kepala BPSDM Hukum. Ia menegaskan bahwa literasi keagamaan lintas budaya bukan hanya soal pemahaman, tetapi juga membentuk kesadaran sosial kultural, karakter bela negara, dan keteladanan ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkeadilan.

Melalui partisipasi ini, ASN Kemenkum Kalsel diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan kolaborasi dalam tugas sehari-hari, sekaligus menjadi motor penggerak terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan menghargai keberagaman.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadirkan Layanan Hukum di Bamara Fair 2025



Banjarmasin, Yankum_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan persiapan stand untuk menghadirkan layanan hukum dalam rangkaian kegiatan Bamara Fair 2025 yang digelar oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Persiapan dilakukan pada Jumat (26/9) di halaman Ex Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Bamara Fair merupakan agenda pameran dan festival tahunan yang tahun ini akan resmi dibuka pada Sabtu (27/9) dengan menghadirkan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran pemerintah daerah.



Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel melibatkan Tim Layanan Kekayaan Intelektual dan Tim Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Persiapan yang dilakukan meliputi penataan booth, pemasangan media informasi, kelengkapan administrasi, serta koordinasi teknis antartim.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel hadir untuk memberikan layanan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, serta layanan hukum lainnya.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Berpartisipasi pada Fun Walk HUT INI ke-117 dan HUT IPPAT ke-38



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan Fun Walk yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke-117 dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke-38. Kegiatan berlangsung pada Sabtu (27/9/2025) di Lapangan Parkir Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan INI dan IPPAT ini diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari notaris, PPAT, instansi pemerintah, hingga organisasi profesi terkait. Tujuannya untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan lintas sektor.

Acara diawali dengan sambutan dari Bacharuddin selaku perwakilan panitia penyelenggara. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya menjaga kekompakan, memperkuat sinergi, serta membangun komunikasi yang harmonis antara Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, serta organisasi profesi notaris dan PPAT.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan hadir melalui Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari, beserta tim. Kehadiran ini menjadi wujud nyata dukungan dan komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam membangun kemitraan strategis dengan organisasi profesi terkait di wilayah kerja Kalimantan Selatan.

Usai pelepasan peserta Fun Walk, rangkaian acara dilanjutkan dengan senam bersama serta pembagian door prize. Suasana kebersamaan dan antusiasme peserta semakin mempertegas semangat kolaborasi yang terjalin.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, INI, IPPAT, serta instansi terkait lainnya dapat semakin erat, demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadir dalam Pembukaan Bamara Fair 2025: Dekatkan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Banjarmasin



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam Pembukaan Bamara (Banjarmasin Maju Sejahtera) Fair 2025 yang berlangsung di Halaman Ex Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Sabtu (27/9).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, serta dihadiri Walikota Banjarmasin, M. Yamin HR, Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, jajaran Forkopimda, serta Ketua dan anggota DPRD Kota Banjarmasin.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan 25 sertifikat pencatatan ciptaan motif Sasirangan Bamara dari Kemenkum Kalsel yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana kepada Walikota, Ketua Dekranasda, dan para pemenang lomba desain motif Sasirangan.

Dalam sambutannya, Walikota Banjarmasin menyampaikan bahwa Bamara Fair merupakan ruang kolaborasi dan kebersamaan antar seluruh pihak, sekaligus sarana promosi yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. “Bamara Fair adalah wujud nyata ruang ekonomi kreatif yang juga memperkuat kebersamaan dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Perindustrian menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi penguatan sosial dan budaya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan para pejabat dan undangan ke stand-stand Bamara Fair, termasuk stand pelayanan publik yang dihadirkan Kanwil Kemenkum Kalsel bagi masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya.



Kemenkum Kalsel Serahkan 25 Sertifikat Hak Cipta Motif Sasirangan pada Bamara Fair 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam melindungi karya kreatif lokal dengan menyerahkan 25 sertifikat pencatatan ciptaan motif Sasirangan Bamara. Penyerahan dilakukan dalam rangkaian Pembukaan Bamara (Banjarmasin Maju Sejahtera) Fair 2025 di Halaman Ex Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Sabtu (27/9).

Sertifikat tersebut diserahkan kepada Walikota Banjarmasin, Ketua Dekranasda, serta para pemenang lomba desain motif Sasirangan, sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap karya intelektual masyarakat Banjarmasin.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, hadir mewakili Kanwil Kemenkum Kalsel dalam acara tersebut. Kehadiran ini menjadi bukti dukungan Kemenkum terhadap upaya pemerintah daerah dalam melestarikan sekaligus melindungi warisan budaya lokal.

Walikota Banjarmasin, M. Yamin HR, mengapresiasi langkah Dekranasda Banjarmasin yang berkolaborasi dengan Kemenkum yang aktif mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual.

“Dengan adanya sertifikat ini, motif Sasirangan tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga terlindungi secara hukum sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ucapnya.

Melalui penyerahan sertifikat ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap masyarakat semakin sadar pentingnya perlindungan hukum atas karya intelektualnya, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya di Kalimantan Selatan.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadir di Bamara Fair 2025: Dekatkan Layanan Hukum ke Masyarakat



Banjarmasin, Yankum_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) kembali berpartisipasi dalam Bamara Fair Kota Banjarmasin Tahun 2025 yang digelar di Halaman Ex Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu (27/9/2025), Kota Banjarmasin.

Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel membuka Stand Layanan Hukum yang memberikan pelayanan informasi, pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), serta konsultasi terkait Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada masyarakat umum, pelaku usaha, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Banjarmasin.

Partisipasi aktif ini mendapat perhatian dari pengunjung pameran. Walikota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, turut hadir mengunjungi stand layanan hukum dan memberikan apresiasi atas kehadiran layanan hukum Kanwil Kemenkum Kalsel dalam rangkaian Bamara Fair Kota Banjarmasin Tahun 2025.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat, khususnya di bidang hukum.



Kemenkum Kalsel Serahkan 25 Sertifikat Hak Cipta Motif Sasirangan pada Bamara Fair 2025



Banjarmasin, Humas_Info - Tim mini soccer Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang merupakan para pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum berhasil membawa pulang piala dalam ajang Turnamen Mini Soccer yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke-117 dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke-38. Turnamen berlangsung di Lapangan Upik Miniso, Sabtu (27/9), dan diikuti berbagai tim dari instansi serta organisasi profesi.

Meski perjalanan sempat terhenti di semifinal, tim Kanwil Kemenkum Kalsel tampil impresif dengan hanya menderita 1 gol sepanjang turnamen hingga ke babak perebutan piala. Babak Perebutan Piala diikuti peserta yang sebelumnya telah berhasil melalui babak kualifikasi dengan peserta di antaranya tim dari Pengwil 1 INI, Kantor Notaris Ina, Kantor Notaris Sabrina, Kantor Notaris Farid, Kantor Notaris Mordan, Kantor Notaris Yayat, ATR/BPN, serta tim Mahasiswa Magister Kenotariatan (M.Kn). Persaingan berlangsung ketat namun tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan.

Partisipasi ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana untuk memperkuat sinergi dan silaturahmi antarinstansi serta organisasi profesi di Kalimantan Selatan. Keberhasilan meraih piala menjadi bukti nyata semangat kebersamaan dan kekompakan yang dibangun di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkassel](#)



[@kemenkumkassel](#)



[kassel.kemenkum.go.id](#)